

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwin, Muhamad. (2019). *Hukum Lingkungan: Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2016). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Alumni.
- Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Sukanda. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, N.H.T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Sumber Lain

1. Jurnal dan Sumber Internet

- Afandi, Fachrizal, Adianto, Daru, Listiningrum, Prisca, & Lovina, Monnachu Wemonicha. (2022). Penggunaan bukti ilmiah dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam putusan perkara pidana materiil lingkungan hidup di Indonesia tahun 2009-2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1).
- Astuti, Alfina Sofi, Kadir, Kayla Nurhaliza, Hanifa, Zheylla Putri, & Kamal, Ubaidillah. (2025). Analisis hukum persetujuan lingkungan terhadap reklamasi ilegal PT Panca Anugrah Nusantara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 53-70.
- Brata, T.A. (2022). Penggunaan scientific evidence dalam pembuktian perkara pidana lingkungan. *Jurnal Wasaka Hukum*.
- Dharmawati, Ni Putu. (2022). Pengesampingan Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Journal of Academic Legal Research*.
- Febriyanti, D. (2021). Fungsi AMDAL dalam pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. *Pranata Hukum*.
- Fitriaah, N. (2019). Tinjauan yuridis tentang sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Wasaka Hukum*.
- Nainggolan, M. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup melalui sistem hukum. *Jurnal Juris*.
- Rahayu, Derita Prapti. (2015). Delik izin lingkungan yang terabaikan: Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, 8(2), 209-228.
- Rochmani. (2024). Pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- Wibisana, Muhammad Andri Gunawan. (2016). Kejahatan lingkungan oleh korporasi: Mencari bentuk pertanggungjawaban korporasi dan pemimpin/pengurus korporasi untuk kejahatan lingkungan di Indonesia? *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2).
- Widayati, Lidya Suryani. (2015). Ultimum remedium dalam bidang lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 1-24.
- ANTARA News. (2024). DLH Majalengka tegur puluhan perusahaan pelanggar lingkungan hidup. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4200183/dlh-majalengka-tegur-puluhan-perusahaan-pelanggar-lingkungan-hidup>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). Evaluasi UU PPLH: Bagaimana UU Cipta Kerja mengubah aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Diakses dari <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/evaluasi-uu-pplh-bagaimana>.

[uu-cipta-kerja-mengubah-aturan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup.](#)

2. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus-LH/2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 187 K/TUN/LH/2017, tanggal 17 Mei 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 258 K/Pid.Sus/2012.

Pengadilan Negeri Balige. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg, tanggal 19 Agustus 2015.

Pengadilan Negeri Manado. Putusan Nomor 357/PID.B/2010/PN.Mdo.

Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn.

3. Data Penelitian

Hasil wawancara tertulis dengan Budi Abdurrahman, S.E., Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, 19 Juni 2026.

Lampiran jawaban wawancara tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tentang Data Rekapitulasi Jumlah Pengaduan Masyarakat Tahun 2023-2025.

Lampiran jawaban wawancara tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tentang Data Kegiatan Usaha yang Belum atau Tidak Memenuhi Dokumen/Persetujuan Lingkungan Tahun 2023-2025.

Lampiran jawaban wawancara tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tentang Data Rekapitulasi Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Dikenakan Surat Teguran atau Peringatan Tahun 2023-2025.

Lampiran jawaban wawancara tertulis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tentang Data Rekapitulasi Jumlah Teguran Tertulis dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Tahun 2023-2025.